



2021

# Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKjIP )

DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PADANG PANJANG

## PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistim akuntabilitas yang memadai. Lebih jauh LAKjIP Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance serta berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum menyajikan secara lengkap dan menyeluruh segenap aspek yang menyangkut rencana dan program kerja pada masing-masing bidang yang dilaksanakan oleh pelaku aktivitas, namun kami berharap data dan informasi yang tersaji dalam laporan ini dapat menjadi referensi dalam melaksanakan evaluasi dan perumusan kegiatan dimasa yang akan datang. Semoga LAKjIP Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang ini membawa manfaat yang positif bagi jajaran aparat Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang pada khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.

Dimasa mendatang, sangat diharapkan masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak demi penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang ini.

Padang Panjang, Januari 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,  
KOTA PADANG PANJANG**



**ARKES REFAGUS, S.Sos**  
Nip.19770522 199511 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah sebagai pembantu kepala daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang pada tahun 2020 dilaksanakan untuk mencapai visi, misi yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang disusun sebagai wujud terciptanya pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang telah dapat melaksanakan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah disetujui dengan hasil yang memuaskan. Pelaksanaan kinerja pada tahun 2021 Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang telah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) sebesar Rp. 8.439.068.151,- dengan jumlah dana yang terealisasi sebesar Rp. 7.940.486.571,50,- atau (94,09%).

Disamping itu Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang juga merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk Retribusi Daerah berupa retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi izin trayek, dengan target pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.441.600.000,- dan telah tercapai sebesar Rp. 2.497.755.260,- dengan presentase sebesar 102,30%.

Dari hasil pencapaian kinerja tahun 2021 secara umum menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan, dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal - hal yang harus mendapatkan perhatian untuk meningkatkan pencapaian kinerja di tahun berikutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang ini disampaikan sebagai pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya manusia meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hasil evaluasi akhir kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2021 secara keseluruhan memuaskan.

Hal ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar semua pihak yang terlibat dalam perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang. Semoga segala upaya yang telah dan akan dilakukan dapat mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, handal, profesional guna terwujudnya kenyamanan transportasi di Kota Padang Panjang.

Demikian ikhtisar eksekutif ini kami sampaikan dan secara lengkap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana terlampir.

## DAFTAR ISI

Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Aspek Strategis Organisasi	6
D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang Dihadapi Organisasi	8
E. Struktur Organisasi	9
F. Sumber Daya Manusia	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Misi	12
B. Tujuan	12
C. Sasaran	12
D. Indikator Kinerja	13
E. Strategi dan Kebijakan	15
F. Program dan Kegiatan	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	25
<b>BAB IV PENUTUP</b>	28



**A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, maka dibentuklah Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah sebagai pembantu Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

**B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perhubungan, bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi
4. Bidang Angkutan dan Perparkiran
5. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. **Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan

yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian
- b. Pengelolaan program administrasi keuangan
- c. Pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, sekretariat terdiri dari :

#### **1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan program umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

#### **2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perhubungan.

### **3. Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi,**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang lalu lintas dan akreditasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan akreditasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bimbingan keselamatan dan pengendalian lalu lintas dan operasional.
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program manajemen rekayasa lalu lintas; dan;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana lalu lintas dan akreditasi.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi terdiri dari :

### **1) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program bimbingan keselamatan dan pengendalian lalu lintas dalam arti melaksanakan perencanaan, bimbingan keselamatan bagi pengendara kendaraan, pengguna jalan, pengaturan di bidang lalu lintas, secara teknis, analisis daerah rawan kecelakaan dan penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas, penetapan rencana induk jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang di jalan, penetapan kecepatan maksimal kendaraan dan larangan menggunakan jalan.

Fungsi Seksi Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional, adalah :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang keselamatan dan pengendalian lalu lintas dan operasional;
- b) Penyelenggara kegiatan bidang bimbingan keselamatan dan pengendalian operasional;
- c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang bimbingan keselamatan dan pengendalian operasional;
- d) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang bimbingan keselamatan dan pengendalian operasional;

### **2) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Fungsi Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, adalah :

- a) Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- b) Pelaksanaan program kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- c) Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- d) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

### **3) Seksi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program sarana prasarana lalu lintas dalam arti merencanakan, menyiapkan serta melakukan pengadaan seluruh sarana prasarana lalu lintas, serta menyelenggarakan program akreditasi dalam arti merencanakan, menyiapkan bahan pengendalian kelaikan kendaraan



bermotor, melakukan pemantauan bimbingan teknis dan operasional, analisis penilaian terhadap pengoperasian kendaraan bermotor dan melakukan evaluasi hasil kelaikan kendaraan.

Fungsi Seksi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi, adalah :

- a) Perencanaan program kegiatan urusan seksi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi;
- b) Pelaksanaan program kegiatan seksi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi;
- c) Pembagian pelaksanaan tugas seksi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi;
- d) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan seksi Teknik Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Akreditasi.

#### **4. Bidang Angkutan dan Perparkiran**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang angkutan dan Perparkiran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang angkutan dan perparkiran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang angkutan orang;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendataan dan pengendalian; dan
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang terminal dan perparkiran.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang angkutan jalan terdiri dari :

##### **1) Seksi Angkutan**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan.

Fungsi Seksi Angkutan, adalah :

- b) Perencanaan program kegiatan urusan seksi angkutan;
- c) Pelaksanaan program kegiatan angkutan;
- d) Pembagian pelaksanaan tugas seksi angkutan;
- e) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan seksi angkutan.

##### **2) Seksi Pendataan dan Pengendalian**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pendataan terhadap semua yang ada pada Dinas Perhubungan, serta mengendalikan pengelolaan angkutan

dalam arti dan melakukan pembinaan, pengawasan dan memproses pemberian perizinan terhadap penyelenggaraan angkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Seksi Pendataan dan Pengendalian, adalah :

- a) Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pendataan dan Pengendalian;
- b) Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pendataan dan Pengendalian;
- c) Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pendataan dan Pengendalian;
- d) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pendataan dan Pengendalian.

### **3) Seksi Terminal dan Perparkiran**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan terminal dan perparkiran dalam arti merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penggunaan terminal, halte, dan tempat parkir, memproses kegiatan pengadaan, penetapan, pemasangan dan pemeliharaan alat pengaman rambu-rambu lalu lintas serta tanda-tanda di jalan daerah, pembangunan, pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan terminal, halte, tempat penyeberangan, jembatan penyeberangan dan perparkiran, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas serta mengkoordinir sumber-sumber pendapatan di Bidang Sarana dan Prasarana.

Fungsi Seksi Terminal dan Perparkiran, adalah :

- a) Perencanaan program kegiatan urusan terminal dan perparkiran;
- b) Pelaksanaan program kegiatan urusan terminal dan perparkiran;
- c) Pembagian pelaksanaan tugas terminal dan perparkiran;
- d) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan seksi terminal dan perparkiran.

### **5. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor.

- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

### **C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Dinas Perhubungan memiliki aspek strategis selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perhubungan. Kota Padang Panjang yang relatif kecil dari kota-kota lainya memilik keunikan dan khas tersendiri, karena Kota Padang Panjang adalah kota yang menjadi jalur perlintasan yang cukup ramai dilalui dan dikunjungi, sehingga hal ini menjadikan perhatian yang khusus dalam hal kenyamanan dan keamanan lalu lintas daratnya.

Padang Panjang memiliki jalur jalan raya kota dan propinsi sepanjang 105,64 KM yang menjadi salah satu perhatian bagi Dinas perhubungan dalam mewujudkan pelayanan angkutan dan ketertiban lalu lintas. Melalui Dinas Perhubungan diharapkan pelayanan angkutan dan ketertiban lalu lintas baik sarana maupun prasarana yang merupakan aspek strategis organisasi dapat terwujud .



## **D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI ORGANISASI**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, menemui permasalahan utama (strategic issued), baik itu di Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi, Bidang Angkutan dan Perpajakan dan UPTD PKB adalah sebagai berikut :

### **a. Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Lalu Lintas dan Akreditasi menemui berbagai permasalahan yang meliputi :

- 1) Masih rendahnya pemahaman pengguna jalan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- 2) Masih rendahnya tingkat disiplin masyarakat dalam mematuhi aturan dan keselamatan lalu lintas;
- 3) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Sipil Negara yang berkompentensi;
- 4) Masih kurangnya kebutuhan fasilitas lalu lintas seperti warning light, traffic light, rambu, RPPJ, quadril, cermin tikung, speed bump dan marka jalan, dll;
- 5) Masih kurangnya sarana untuk mobilisasi.

### **b. Bidang Angkutan dan Perpajakan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Angkutan dan Perpajakan menemui berbagai permasalahan yang meliputi :

- 1) Masih rendahnya minat masyarakat menggunakan kendaraan angkutan umum.
- 2) Belum tersedianya angkutan umum yg representative.
- 3) Masih Kurangnya Sarana Prasarana pada rest area atau Terminal Angkutan Barang.
- 4) Masih kurangnya Satuan Ruang Parkir di Kota Padang Panjang.
- 5) Masih kurangnya sarana prasana pada Terminal Type C kota padang panjang.

### **c. UPTD PKB**

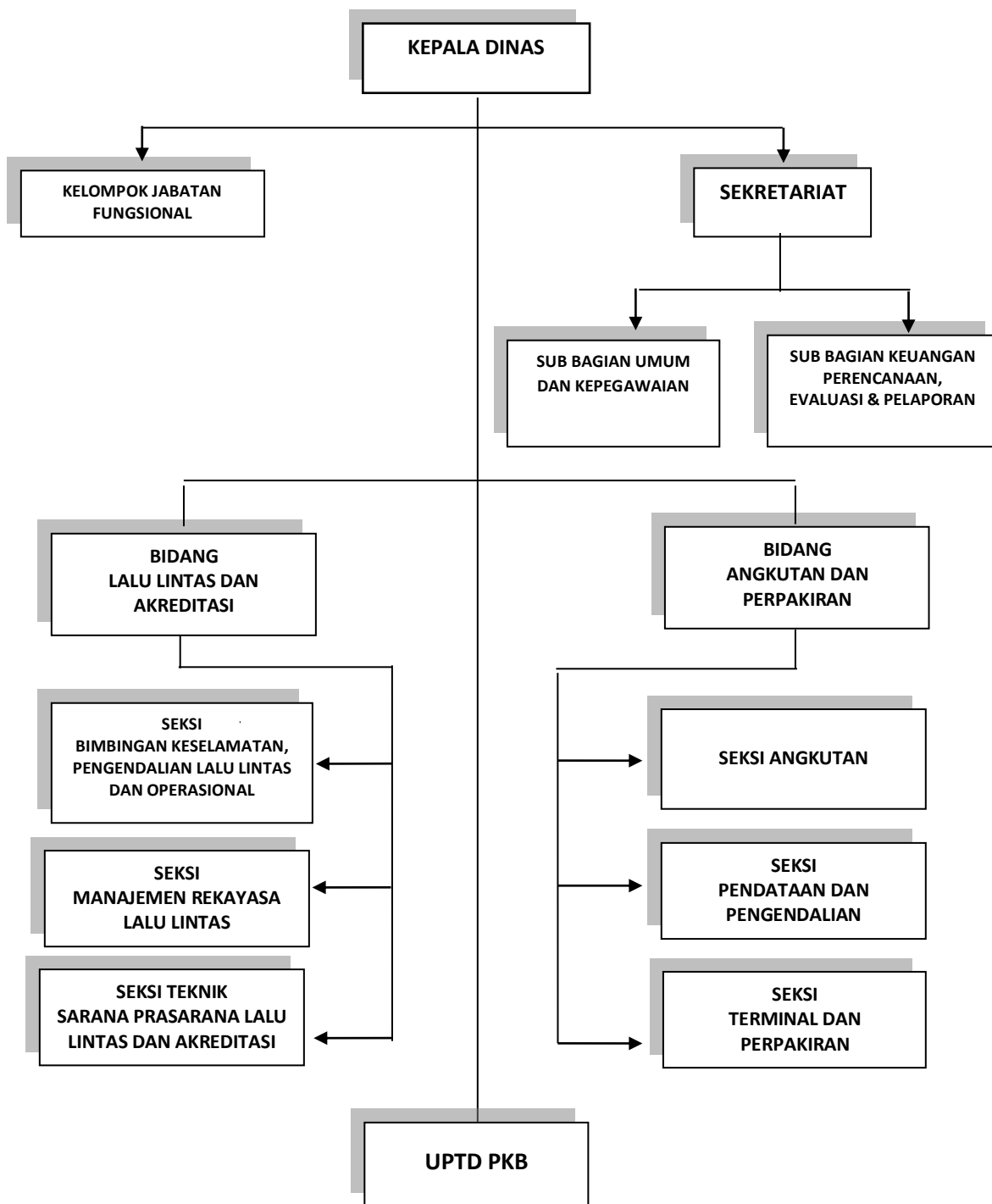
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya UPTD PKB menemui berbagai permasalahan yang meliputi :

- 1) Perlunya diperbarui Sertifikat Penguji sudah kadaluwarsa/mati.
- 2) Perlu dilakukan kenaikan jenjang kompetensi bagi penguji.
- 3) Kurang memadainya Komputer Data Base dan Komputer Pendaftaran dan penyimpanan data.

### E. STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Gambar. 1.1  
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



### F. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang menurut golongan ruang/kepangkatan dan jenis kelamin pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat**  
**Tahun 2021**

Unit Kerja	Jenis Kelamin		Golongan				Jumlah
	Pria	Wanita	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	
Kepala	1					1	1
Sekretariat	9	1	1	3	5	1	10
Bid. Lalu Lintas	16	2		10	7	1	18
Bid. Angkutan	10			5	5	1	10
UPTD PKB	7	1		3	5		8
Jumlah	43	4		21	22	4	47

Berdasarkan kualitas dan tanggungjawab kerja, SDM Dinas Perhubungan dibedakan menurut basis pendidikan dan unit kerjanya terinci pada tabel 1.2

**Tabel 1.2**  
**Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2021**

Unit Kerja	SD-SLTP	SLTA	D2 – D3	S1	S2	Jumlah
Kepala				1		1
Sekretariat	2	2	2	4	-	10
Bid. Lalu Lintas	2	10	-	5	1	18
Bid. Angkutan	1	4	1	4	1	10
UPTD PKB	-	2	4	2	-	8
Jumlah	5	18	6	16	2	47

Secara riil jumlah pegawai Dinas Perhubungan masih belum memadai menurut hasil analisa jabatan, formasi yang ada sebanyak 47 orang ASN.

Sejalan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia ASN yang ada untuk

mengenyam pendidikan dan latihan kualifikasi teknis di bidang perhubungan dapat dilihat pada tabel 1.3

**Tabel 1.3**  
**Data Kualifikasi Teknis**  
**Yang Dibutuhkan pada Dinas Perhubungan**

Kualifikasi	Kondisi Riil	Jumlah Ideal	Kurang
Penguji	4	8	4
PPNS	2	4	2
D.IV Transportasi Darat	2	6	4
D.III Ahli LLAJ	-	12	12
Jumlah	8	30	22

Guna meningkatkan layanan khusus formasi yang tidak dapat diisi oleh ASN dan ketugasan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat perhubungan, melalui kegiatan-kegiatan yang mengangkat Tenaga Harian Lepas. Berdasarkan ketugasan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perhubungan disajikan pada tabel 1.4

**Tabel 1. 4**  
**Data Tenaga Harian Lepas/Non ASN pada Dinas Perhubungan**  
**Tahun 2021**

Unit Kerja	Ketugasan	Jumlah
Sekretariat	Administrasi perkantoran	3
	Sopir	4
	Pengaja Malam	1
	Tenaga kebersihan	5
	Tenaga Bantuan Lalu Lintas	11
Bidang Angkutan	Petugas TPR	6
	Pemungut Retribusi Parkir	16
UPTD PKB	Penjaga malam	1
	Petugas Kebersihan	1
Jumlah		48



**A. MISI**

Misi adalah pernyataan tentang tujuan operasional organisasi dalam mencapai visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni :

**“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat“**

diwujudkan dalam produk rencana aksi dan pelayanan sehingga dapat mengikuti irama perubahan jaman pihak-pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang.

Adapun misi Dinas Perhubungan senada dengan Misi 1 Kota Padang Panjang adalah :

**“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan”**

**B. TUJUAN**

Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sebagai penyelenggaraan urusan perhubungan mempunyai tujuan dalam menggerakkan organisasinya yang berpijak pada RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023 sasaran 2 (dua) meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan dan menjadi tujuan bagi Dinas Perhubungan yakni :

**“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perhubungan Berkelanjutan”**

Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan.

**C. SASARAN**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi, perlu ditentukan sasaran apa yang akan dilakukan untuk pencapaian tersebut, oleh karenanya Dinas Perhubungan memiliki 2 (dua) sasaran dalam pencapaian tujuan dimaksud, yakni :

- 1. Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas;**
- 2. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Jalan.**

**Tabel 2.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
Untuk Kejayaan Kota Padang panjang yang bermarwah dan Bermartabat	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perhubungan Berkelanjutan	Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas	a. Jumlah Kecelakaan
			Meningkatnya pelayanan angkutan jalan	a. Persentase panjang trayek jalan terlayani b. Persentase Kendaraan Lulus Uji Keur

#### D. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Dinas Perhubungan**

No	Indikator	Target	Rumus yang digunakan
		Tahun 2021	
1	2	4	6
1	Jumlah Kecelakaan	33	Jumlah kecelakaan tahun n
2	Persentase panjang trayek jalan terlayani	33,95%	Jumlah panjang jalan trayek tahun n dibagi jumlah total panjang jalan tahun n dikali 100 persen
3	Persentase Kendaraan Lulus Uji Keur	98,16%	Jumlah kendaraan lulus uji keur tahun n dibagi jumlah taman kendaraan tahun n dikali 100 persen

Indikator kinerja Sasaran Daerah merupakan salah satu indikator pendukung penghitungan sasaran daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan.

**Tabel 2.3**

**Indikator Kinerja Sasaran Daerah Urusan Perhubungan**

No	Indikator	Target	Rumus yang digunakan
		Tahun 2021	
1	2	4	6
1	Persentase Fasilitas Keselamatan lalu Lintas yang Berkualitas	83,08%	Jumlah total persentase fasilitas keselamatan tahun n dibagi jumlah jenis faskes tahun n dikali 100 persen

Indikator kinerja utama Dinas perhubungan juga menjadi indikator dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas perhubungan Tahun 2020, seperti tabel dibawah ini.

**Tabel 2.4**

**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

**Dinas Perhubungan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas	a. Jumlah Kecelakaan	33
2.	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Jalan	a. Persentase panjang trayek jalan terlayani	33,95%
		b. Persentase Kendaraan Lulus Uji Keur	98,16%

Program		Anggaran
1.	Penyelenggaraan Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.981.659.150,-

## G. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dinas Perhubungan tahun 2021 adalah melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan pelayanan angkutan umum serta pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Arah Kebijakan yang merupakan upaya untuk menjalankan strategi yang telah ditetapkan sehingga dari kebijakan kebijakan tersebut dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan.

**Tabel 2.5**  
**Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan**

Misi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perhubungan Berkelanjutan	Meningkatnya Pelayanan Ketertiban Lalu Lintas	Meningkatkan kualitas sarana prasarana lalu lintas, pengamanan dan pengendalian lalu lintas	1. Penyediaan dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas 2. Mengadakan pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
	Meningkatnya pelayanan angkutan jalan	Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan pelayanan angkutan	1. Penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas angkutan jalan. 2. Mengadakan operasi penegakan hukum atas pelanggaran dokumen angkutan barang/orang.

## H. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dalam tahun anggaran 2021 telah dapat melaksanakan 2 (Dua) program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan, diantaranya :

- ◆ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah program rutin yang mendukung kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan baik internal maupun eksternal.
- ◆ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah program yang menjadi urusan Dinas Perhubungan secara keseluruhan baik fisik maupun non fisik yang mendukung sasaran kinerja Dinas Perhubungan dan menjadi dasar penghitungan indikator kinerja utama perangkat daerah.

Adapun klasifikasi program pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, sebagai berikut :

**Tabel.2.6**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2021**

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
A	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah</b>		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	15 laporan
		<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan	14 bulan
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	17 laporan
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis realisasi anggaran	1 laporan
		<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen alat listrik yang disediakan	5 jenis
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik, Jumlah Unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	5 jenis
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis cetak dan penggandaan	2 jenis
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan, jumlah rapat koordinasi	550 / 50

		SKPD	dan konsultasi yang di ikuti		
		<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah unit alat-alat kantor yang diadakan, Jumlah Unit alat-alat kantor yang disediakan 2. Jumlah Kendaraan yang diadakan 3. Jumlah Meubilier yang diadakan	1 unit
		<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Jumlah jenis komponen, jumlah tagihan rekening yang dibayar	3 jenis
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran	15 org
		<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	11 unit
			Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau lapangan yang terpelihara	3 unit
			Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah Alat besar yang terpelihara	1 unit
			Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	1. Jumlah Unit Gedung dan perlengkapan kantor yang dijaga dan dibersihkan 2. Jumlah Rehab Sedang berat gedung kantor	2 unit
<b>B</b>	<b>Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>7</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah unit sarana dan prasarana yang tersedia</b>	
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis rambu- rambu dan fasilitas keselamatan lalu lintas	1 jenis
			Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	1. Jumlah jenis alat pengendalian lalu lintas 2. Jumlah jenis alat Pengamanan lalu lintas 3. Jumlah Lokasi Parkir 4. jumlah penambahan jaringan tiang dan lampu jalan dalam kota	1 jenis, 16 lokasi
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	jumlah jenis sarana prasarana keselamatan lalu lintas	5 jenis
		<b>8</b>	<b>Pengelolaan Terminal Tipe C</b>	<b>Jumlah ketersediaan fasilitas terminal berdasarkan SPM</b>	
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	1. jumlah dokumen yang disusun	10 buah, 15 hari

				2. jumlah hari razia penertiban angkutan barang/orang 3. Jumlah fasilitas terminal yang tersedia	
		9	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Jumlah pelaksanaan Keur</b>	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah alat penguji kendaraan bermotor yang di pelihara	10 unit
		10	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota</b>	<b>V/C ratio lalu lintas</b>	
			Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota	jumlah pertemuan forum LLAJ	1 kali
		11	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Jumlah kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya</b>	
			Pelaksanaan Inspeksi Audit dan pemantauan system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	Jumlah kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya	3 kegiatan
		12	<b>Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang</b>	
			Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (Satu) kabupaten/kota	1. Jumlah angkutan mudik 2. Jumlah kegiatan pengelolaan terminal/pangkalan truk 3. Jumlah tenaga pemungut retribusi 4. Jumlah pangkalan truk yang dipelihara. 5. Jumlah portal TPR	2 unit, 1 kegiatan, 1 unit, 2 unit, 6 orang

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja pada Dinas Perhubungan Tahun 2021 dapat dihitung capaian indikator utama sebagai berikut :

## 1. Capaian Indikator Kinerja mengacu RPJMD 2018-2023

Capaian indikator kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021 mengacu pada RPJMD 2018-2023 dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2020 dengan realiasi kinerja tahun sebelumnya seperti tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah**  
**Dinas Perhubungan Tahun 2021**

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Realisasi 2020
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Rata-rata Persentase perlengkapan keselamatan fasilitas	83,03%	83,20%	100.20%	81,99%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah pada RPJMD 2018-2023 pada tahun kedua ini menunjukkan angka capaian yang sangat baik dimana terlihat realisasi kinerja pada tahun 2021 memenuhi target kinerja yang telah ditentukan. Adapun data pendukung pencapaian indikator kinerja Persentasi Perlengkapan Fasilitas Keselamatan, sebagai berikut :



**Tabel 3.2**  
**Data Dasar Indikator Kinerja**  
**Persentase Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas yang Berkualitas**  
**Dinas Perhubungan Tahun 2021**

No	Kegiatan	Pembilang/ Penyebut	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan
1.	Warning Light	$\frac{22}{27} \times 100\%$	81,48%	83,87%	-2,85%
2.	Traffic Light	$\frac{4}{7} \times 100\%$	57,14%	57,14%	0%
3.	Rambu-Rambu	$\frac{680}{815} \times 100\%$	83,43%	84,47%	-1,23%
4.	Halte	$\frac{21}{21} \times 100\%$	100,00%	87,50%	12,50%
5.	Cermin Tikung	$\frac{31}{33} \times 100\%$	93,94%	96,97%	-3,12%
	<b>Total</b>		<b>83,20%</b>	<b>81,99%</b>	<b>1,47%</b>

- Indikator kinerja program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan umum dari target 83,03% dengan realisasi kinerja 83,20% menunjukkan bahwasanya capaian kinerja dari target adalah 100,20% dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang telah direncanakan sehingga persentase perlengkapan fasilitas keselamatan pun tercapai. Dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 81,99% terjadi kenaikan sebesar 1,47% dengan adanya penambahan, penghitungan kembali fasilitas keselamatan lalu lintas. Dinas Perhubungan pada Tahun 2021 telah berupaya memenuhi fasilitas lalu lintas yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya, sebagai berikut :
  - ✓ Warning Light hingga tahun 2021 total warning light yang terpasang 27 unit, dan hanya 22 unit warning light yang berfungsi baik sehingga capaian kinerja sampai tahun 2021 mencapai 81,48% dengan kinerja bernilai Baik, dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2020 terjadi penurunan karena dilakukan pendataan ulang dan ditemukan 4 unit adalah milik Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat.
  - ✓ Traffic light adalah lampu yang digunakan untuk mengatur kelancaran lalu lintas pada suatu persimpangan jalan dengan cara memberi kesempatan pengguna jalan untuk bergerak secara bergantian dan hal ini diharapkan dapat menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas, hal ini menjadi salah satu sasaran kinerja dengan pengadaan traffic light dimana hingga tahun 2021 sarana Traffic Light terpasang pada 4 lokasi persimpangan titik dalam kondisi baik dari 7 titik lokasi yang terpasang, dan capaian kinerja baru

57,14%, dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2020 masih sama namun terdapat peningkatan dari kualitas sarana yang telah diperbaharui melalui bantuan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

- ✓ Rambu lalu lintas berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pengguna jalan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran dalam berlalu lintas, dalam hal membentuk kesadaran masyarakat pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas perlu ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai termasuk rambu-rambu lalu lintas. Pada tahun 2021 terdapat penambahan pemasangan rambu-rambu serta perbaikan dalam arti kata mencabut rambu yang tidak layak lagi dipasang atau rusak berat dan penggantian/penambahan pemasangan rambu-rambu sebanyak 18 unit sehingga sampai dengan tahun 2021 berjumlah 680 unit dalam keadaan baik dari 815 unit rambu-rambu atau mencapai 83,03%, dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2019 dengan realisasi kinerja 81,99% maka terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 1,47% hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan penambahan jumlah rambu – rambu lalu lintas dalam rangka mencapai sasaran yang ingin dicapai.
- ✓ Hingga tahun 2021 jumlah halte yang tersedia 21 unit dalam kondisi baik dari total 21 unit yang ada dengan capaian kinerja sebesar 100%, keberadaan halte ini masih dibutuhkan sebagai salah satu bagian dari prasarana angkutan umum bagi masyarakat Kota Padang Panjang yang sehari-harinya menggunakan jasa angkutan dalam beraktivitas, selain sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang dalam kondisi sekarang halte adalah sebagai simpul dan transfer poin bagi pengguna moda transportasi umum. Adapun terjadi penurunan dari realisasi tahun 2020 dikarenakan penghitungan kembali asset daerah dan ditemukan 2 halte bukan milik Dinas Perhubungan.
- ✓ Cermin Tikung merupakan salah satu fasilitas keselamatan lalu lintas yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Pemasangan cermin cembung ini masih sangat diharapkan masyarakat dengan kondisi jalan di Kota Padang panjang yang berkelok – kelok dengan kebebasan pandang yang kecil, sampai tahun 2021 capaian kinerja pemasangan ini adalah 31 unit dalam kondisi baik dari 33 unit yang telah terpasang sehingga persentase capaian kinerja mencapai 93,94%, dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2020 terjadi penurunan disebabkan 1 unit cermin tikung

dibuka/dicabut karena pelebaran jalan. Namun melihat kondisi geografis Kota Padang Panjang maka kebutuhan akan cermin tikung cukup tinggi dan perlu penambahan kedepannya.

## 2. Capaian indikator kinerja utama

Capaian kinerja indikator utama Dinas Perhubungan yang juga tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan tahun 2018-2023 serta menjadi perjanjian kinerja pimpinan Dinas perhubungan tahun 2021 dengan target dan realisasi pada tabel berikut.

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2021**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Realisasi 2020	Kenaikan/ Penurunan Capaian (%)
Meningkatnya Pelayanan Ketertiban Lalu Lintas	Jumlah Angka Kecelakaan	Angka	33	46	71,74	30	(53,23)
Meningkatnya pelayanan angkutan jalan	Persentase panjang trayek jalan terlayani	Persen	33,95%	33,95%	100,00	27,02	0
	Persentase kendaraan lulus uji keur	Persen	98,16%	157,25%	160,20	97,95	62.28

Dapat dilihat dari tabel diatas adanya realisasi kinerja yang mengalami kenaikan atau penurunan sehingga mempengaruhi persentase capaian kinerja tahun 2021.

### ➤ **Jumlah Kecelakaan**

Angka kecelakaan yang terjadi di Kota Padang Panjang tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (53,23%).

Target angka kecelakaan tahun 2021 sebanyak 33 dengan realisasi angka kecelakaan sebanyak 46 atau 71,74%. Data angka kecelakaan di Kota Padang Panjang sebagai berikut :

**Tabel.3.4**  
**Jumlah Kecelakaan Lantas Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2021**

No	Bulan	Jumlah Laka	Jumlah Korban Laka lantas		
			MD	LB	LR
1.	Januari	4	1	-	5
2.	Februari	4	-	-	8
3.	Maret	5	-	-	8
4.	April	6	-	-	10
5.	Mei	3	1	-	3
6.	Juni	5			6
7.	Juli	3			3
8.	Agustus	1	1		
9.	September	5	2		9
10.	Oktober	2			3
11.	November	3			8
12.	Desember	5			6
J u m l a h		46			

*Sumber : Polres Kota Padang Panjang tahun 2021*

Faktor masih adanya angka kecelakaan pada tahun 2021 menurut data Polres Kota Padang Panjang adalah :

- a. Pengendara kurang berhati-hati dalam mengendarai kendaraanya (kecepatan tinggi, tidak perhitungan saat ditikungan, memotong kendaraan, berbelok (Human Error);
- b. Pejalan kaki kurang berhati-hati berjalan/menyeberang di jalan raya/umum (human error);
- c. Menyeberang jalan tidak pada area zebra cross;
- d. Melanggar rambu traffic light.
- e. Kondisi kendaraan yang kurang terpelihara.
- f. Usia belum matang dalam berkendara/belum memiliki SIM.

Angka kecelakaan tahun 2021 mengalami kenaikan dari target yang diperkirakan. Adapun hal yang telah dilakukan untuk menekan naiknya angka kecelakaan tersebut diantaranya yaitu :

- a. Memasang speedbumps pada ruas jalan mencegah kendaraan laju dengan cepat.

- b. Memasang pagar pengaman/guardrail pada tepi jalan yang curam atau tikungan panjang agar kendaraan atau pejalan kaki yang melewati jalan tersebut dapat berhati-hati.
- c. Memasang rambu-rambu peringatan pada daerah rawan kecelakaan atau ramai dilalui oleh pejalan kaki (sekolah, perkantoran).
- d. Pengamanan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan pada jam sibuk (pagi dan sore) pada titik-titik lokasi rawan.

➤ **Persentase panjang trayek jalan terlayani**

- ✓ Target Kinerja 33,95% dan realisasi sebesar 33,95%.
- ✓ Data Panjang jalan trayek aktif tahun 2021 adalah sepanjang 35.8 Km dibanding jumlah panjang jalan kota sepanjang 105,46 Km
- ✓ Capaian persentase panjang trayek jalan terlayani tahun 2021 sebesar 100%.
- ✓ Faktor pendorong dimana angkutan kota beroperasi pada panjang jalan trayek terlayani serta penambahan operasional 2 unit bus sekolah Dinas Perhubungan pada 2 wilayah kecamatan di Kota Padang Panjang.

➤ **Persentase kendaraan lulus uji keur**

- ✓ Target tahun 2021 sebesar 98,16% dengan realisasi sebesar 157,25%.
- ✓ Data jumlah kendaraan yang keur tahun 2021 sebanyak 3.711 berbanding jumlah kendaraan yang wajib pengujian sebanyak 2.360.
- ✓ Capaian naik dari realisasi tahun 2020 sebesar 62,26%.
- ✓ Faktor pendorong antara lain :
  - Gedung Representatif
  - Alat Uji 10 Unit
  - Tenaga Penguji Sertifikasi 3 orang
  - Status Akreditasi B
  - Kartu e-blue (bukti lulus uji emisi elektronik)
  - Numpang uji kendaraan bermotor dari beberapa daerah di Sumatera Barat dikarenakan sarana uji pada UPTD PKB di daerah tersebut belum memadai.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas perhubungan Tahun 2021 sebesar Rp. 7.940.486.571,50 atau (94,09) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.439.068.151,- sebagai berikut :

### 1. Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Utama

Anggaran Indikator Kinerja Utama untuk mewujudkan sasaran Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 1.981.659.150,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.925.747.331,50 atau 97,18%, sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Anggaran Program Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Perhubungan Tahun 2021**

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Keuangan		Persentase
			Pagu	Realisasi	
Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas	Jumlah angka kecelakaan	Penyelenggaraan Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.981.659.150,-	1.925.747.331,50	97,18%
Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	- Persentase panjang trayek jalan terlayani - Persentase kendaraan lulus uji keur				

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa target program indikator kinerja utama terealisasi dengan capaian bernilai baik, hal ini membuktikan bahwasanya target tercapai untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan serta misi pertama RPJMD Kota Padang Panjang lebih lanjut diuraikan pada realisasi kinerja program sasaran daerah pada tabel 3.5

### 2. Realisasi Anggaran Program Sasaran Daerah

Anggaran program sasaran daerah yang menjadi salah satu indikator penghitungan kualitas infrastruktur berkelanjutan di Kota Padang Panjang Panjang.

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Anggaran Program Sasaran Daerah**  
**Dinas Perhubungan Tahun 2021**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I	<b>Penyelenggaraan Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	1.981.659.150,-	1.925.747.331,50	<b>98,25</b>
1	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	812.384.600,-	795.776.530,50	97,96
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan	22.800.000,-	22.781.000,-	99,92

	Kabupaten/Kota			
	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	716.584.600,-	702.721.530,50,-	98,07
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	73.000.000,-	70.274.000,-	96,27
2	<i>Pengelolaan Terminal Tipe C</i>	31.310.000,-	29.878.125,-	95,43
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	31.310.000,-	29.878.125,-	95,43%
3	<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	39.000.000,-	38.205.000,-	97,96
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	39.000.000,-	38.205.000,-	97,96
4	<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	14.487.000,-	13.975.000,-	96,47
	Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota	14.487.000,-	13.975.000,-	96,47
5	<i>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan</i>	446.201.600	437.689.322,-	98,09
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan pemantauan system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	446.201.600,-	437.689.322,-	98,09
6	<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</i>	638.275.950,-	610.223.354,-	95,60
	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (Satu) kabupaten/kota	638.275.950,-	610.223.354,-	95,60

Program yang mendukung sasaran daerah pada Dinas Perhubungan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 1.981.659.150,- terealisasi sebesar 1.925.747.331,50 (97,18%), dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

- ✧ Pengadaan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 18 unit.
- ✧ Pengadaan marka jalan 427,0 m<sup>2</sup>.
- ✧ Pengadaan tanggul/speedbump sebanyak 15 titik.
- ✧ Pengadaan Portal 2 unit.

### 3. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Umum

Realisasi anggaran program/kegiatan umum tahun 2021 sebesar Rp. 952.438.511,- dari target anggaran sebesar Rp. 1.020.185.000,- atau 93,35 %, sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Umum**  
**Dinas Perhubungan Tahun 2021**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota</b>	<b>6.457.409.001,-</b>	<b>6.014.739.240,-</b>	<b>93,14</b>
1	<b>Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat</b>	<b>999.850,-</b>	<b>868.300,-</b>	<b>86,84</b>
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	999.850,-	868.300,-	86,84
2	<b>Administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.387.683.350,-</b>	<b>5.126.459.995,-</b>	<b>95,15</b>
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	5.385.581.700,-	5.125.344.095,-	95,17
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.510.000,-	676.200,-	44,776
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD Akhir Tahun SKPD	384.700,-	263.600,-	68,52
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	206.450,-	176.1100,-	85,30
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>292.104.100,-</b>	<b>225.981.912,-</b>	<b>77,36</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.822.650,-	3.676.000,-	46,99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.697.200,-	26.972.300,-	64,69
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.599.850,-	77.594.000,-	86,60
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	152.984.400,-	117.739.612,-	76,96
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4.000.0000,-</b>	<b>4.000.000,-</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.0000,-	4.000.000,-	100
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>467.818.201,-</b>	<b>430.518.983,-</b>	<b>92,03</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	50.853.401,-	45.710.421,-	89,89
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	416.964.800,-	384.808.562,-	92,29
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>304.803.500,-</b>	<b>226.910.050,-</b>	<b>74,44</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.688.000,-	51.005.000,-	74,26
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	127.454.000,-	96.029.600,-	75,34
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	39.908.000,-	26.177.600,-	65,59
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	68.753.500,-	53.697.850,-	78,10
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.457.409.001,-</b>	<b>6.014.739.240,-</b>	<b>93,14</b>

Secara keseluruhan kegiatan rutin pada Dinas Perhubungan terealisasi dengan baik terlihat pada persentasi capaian keuangan diatas 90%.



## **1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja**

Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis sektor perhubungan berusaha untuk memaksimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun anggaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta berusaha untuk memanfaatkan sumber daya tersebut dengan efekti dan efisien. Meskipun demikian Dinas Perhubungan berusaha untuk bertanggungjawab mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang pada umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilihat dari manajemen daerah, sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah telah menunjukkan peningkatan kemampuan yang cukup berarti, salah satunya dengan melibatkan seluruh komponen baik pemerintah maupun peran swasta dan masyarakat insan perhubungan baik dalam perencanaan partisipasif maupun dari sisi pengisian pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian sasaran tujuan otonomi daerah secara khusus dan tujuan negara pada umumnya dimana hakekatnya yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

Proses pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 secara keseluruhan dapat berjalan lancar serta menunjukkan keberhasilan yang berarti, meski ada beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran dampak Covid 19.

## **2. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah**

Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada tahun 2021 tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi baik yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah langkah dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Terbatasnya tenaga teknis dan tenaga administrasi;
2. Kurangnya sarana mobilitas pendukung pelaksanaan kegiatan Dinas;
3. Sarana dan prasarana lalu lintas yang belum memadai;
4. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam berlalu lintas.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah :

1. Memberdayakan pegawai dengan kemampuan teknis untuk memberikan pembekalan kepada petugas operasional lapangan terkait tugas di bidang transportasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Berusaha untuk melakukan perencanaan anggaran untuk menambah sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
3. Mengoptimalkan prasarana yang telah ada dengan melakukan perawatan yang intensif agar prasarana lalu lintas dapat berfungsi dengan baik
4. Melakukan pengawasan dan pengendalian prasarana lalu lintas di setiap jam sibuk pagi di lokasi rawan kecelakaan dan macet.
5. Melakukan pemeriksaan oleh PPNS Perhubungan yang dilaksanakan secara periodik untuk angkutan barang dan angkutan umum.

Akhir kalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Tahun 2021 ini tentu tak luput dari kekurangan, dengan harapan dapat dikritisi dan dievaluasi agar kedepan lebih baik. Wassalam.

Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Padang Panjang



**ARKUS REFAGUS, S.Sos**  
Nip. 19651112 198602 1 002